

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Internusa, 1986)
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005)
- \_\_\_\_\_, Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015)
- \_\_\_\_\_, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Edisi Revisi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2005)
- Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- GHS Lumban Tobing, *“Peraturan Jabatan Notaris Didalam Laurensius”*, (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Harun Al Rasyid, *Sekilas Tentang Jual Beli Atas Tanah*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1989)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Di Bidang Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Idham, *Dimensi politik hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di kawasan hutan lindung: Untuk mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat kampung tua Kota Batam*, (Batam: Alumni, 2019)
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003)
- John Salindeho, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995)
- M.Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swara Justitia, 2005)
- Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Myrna A. Safitri, dkk., *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Tentang Prinsip, Prasyarat dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*, (Jakarta: Epistema Institute, 2011)
- N.E Algra, H.R.W Gokkel – dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, (Belanda-Indonesia: Bina cipta edisi cetakan 1, 1983)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Philipus M. Hadjon, “*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*”, (Surabaya: Surabaya Post)
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- \_\_\_\_\_, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Cet.17*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1988)
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Than Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007)
- Udin Narsudin, “*QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*”, (Jakarta: Nas Media Pustaka, 2022)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Preneda Media Group, 2005)
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitangguh, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1993)
- Yuliana Cahya Wulan, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia*, (Bogor: Center for International Forestry Research, 2004)

## **JURNAL DAN KARYA ILMIAH:**

- Agus Budiarto, Shinta Pangesti, Debora Pasaribu, & Stephanie Faustina, "Barcoding Digital Signature Authenticity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, April 2021. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274>
- Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, "Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum," *Juris and Society, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021). DOI: <http://repository.unpas.ac.id/52056/1/12-Article%20Text-27-1-10-20210602.pdf>
- Destara Sati, "Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2019. DOI: <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/94/83>
- Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa, "Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5 No. 2-2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>
- Hastuti Mappamiring Abdi, "Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang", *Jurnal Unismuh*, Vol. 2 No. 1, Februari 2021. DOI: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>
- La Taati, "Analisis Komposisi Dan Potensi Hutan Produksi Di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Dampelas Tinombo Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala", *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11, November 2015. DOI: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6474/5161>
- Nawaaf Abdullah Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017, DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/324721-kedudukan-dan-kewenangan-notaris-dalam-m-f8bcb1e9.pdf>
- Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan "AL-Razi"* Vol. 18 No. 2, 2018. DOI: <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>
- Priyo Katon Prasetyo, Rosye Villanova Christine, Sudibyanung, "Implementasi Asas Keterbukaan Pada Pengadaan Tanah Bagipembangunan Untuk Kepentingan Umum: Antara Harapan Dan Kenyataan", *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 1, Mei 2020. DOI: 10.31292/jb.v6i1.421
- Sawin Dwi Hapsari, "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian

Bagi Pemiliknya”, Jurnal Akta, Vol. 4. No. 1, Maret 2017. DOI: <https://dx.doi.org/10.30659/akta.4.1.51-54>

SK Dekan Fakultas Hukum Nomor: 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan”, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)

Trina Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)”, Jurnal Hukum “Yustisia, Vol.5, No.2, 2016. DOI: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8744>

Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Jurnal Hukum “Adil” Vol. 7, No. 1, 2016. DOI: <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/331/223>

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Putusan : M-01.HT.03.01 TAHUN 2003 tentang Kenotarian

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 28 Januari 2005

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

### **PUTUSAN:**

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Putusan Nomor :21 PK/PDT/2019

Putusan Pengadilan Negeri Gianjar, Nomor: 259/Pdt.G/2020/PN.Gin

### **WEBSITE/INTERNET:**

Hukum Online, “Pertanahan & Properti Konsekuensi Jika Hak Atas Tanah Lama Tak Segera Diurus Sertifikatnya”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-jika-hak-atas-tanahlama-tak-segera-diurus-sertifikatnya-lt617fe39d8ed10/>, diakses pada 28 Mei 2023

Hukum Online “Konversi Tanah Berstatus Eigendom”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konversi-tanah-berstatus-eigendom-lt4ee984c34448a/>, diakses tanggal 28 Mei 2023

Hukum Online, “Waspada! Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam bertugas”

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspada-tuntutan-pidana-yangmungkindihadapi-notaris-dalam-bertugas>, diakses tanggal 28 Mei 2023

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Pengertian Eigendom dan Konversinya”. <https://mh.uma.ac.id/pengertian-eigendom-dan-konversinya/>, di akses tanggal 7 Mei 2023.

Peran Fungsi dan keberadaan Notaris di Indonesia”.

<https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/>, diakses tanggal 15 Mei 2023

Rusmadi Murad dalam J. Sembiring, Konflik Perkebunan di Indonesia,

<http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/3%20J.%20Sembiring.pdf>, di akses tanggal 11 Mei 2023

Pengertian Pengawasan -Controlling,” [https:// Pengertianahli.](https://Pengertianahli.Id/PengertianPengawasanControlling)

[Id/PengertianPengawasanControlling](https://Pengertianahli.Id/PengertianPengawasanControlling), diakses tanggal 02 Mei 2023